

MERUBAH PETAKA MENJADI BERKAH: Optimalisasi Bonus Demografi bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh: Eko Marhaendy

Indonesia menyumbang sekira 3,53 persen populasi dunia yang telah mencapai 7,3 Milyar. Dengan jumlah penduduk 260,58 juta jiwa (Sumber: U.S Census Bureau), Negeri Khatulistiwa ini didaulat sebagai negara berpenduduk terbesar keempat setelah Cina, India dan Amerika.

Angka kelahiran pada kenyataannya tidak selalu diamini sebagai berkah; dalam banyak hal ia justru dianggap menjadi “petaka.” Sejumlah ilmuwan memperkirakan bumi hanya mampu menampung 9-10 milyar manusia; betapapun ada anggapan bahwa jumlah bukanlah persoalan mendasar.

Seperti dilansir Tribun dari penjelasan David Satterthwaite, senior International Institute for Environment and Development di Inggris; over populasi bukan soal jumlah manusia yang ada di planet bumi, tapi masalah bagaimana mereka menghabiskan sumber daya alam.

Memang, dampak paling kentara yang diakibatkan oleh ledakan penduduk adalah “kerusakan alam.” Faktanya, bumi dengan sumberdaya yang terbatas, terpaksa—jika bukan dipaksa—memenuhi kebutuhan umat manusia yang jumlahnya terus meningkat. Paling tidak manusia membutuhkan lahan pemukiman; udara segar; air bersih; dan bahan makanan; yang seluruhnya berpengaruh langsung pada lingkungan.

Alhasil, rilis yang dilakukan World Economic Forum dalam survei bertajuk *Global Shapers Annual Survey 2016*, menguatkan fakta di atas. Menurut survei tersebut, perubahan iklim, sepertihalnya pemanasan global yang berdampak pada kerusakan lingkungan, menjadi isu paling dikhawatirkan generasi millennial. Menempati posisi pertama dengan angka 45,2 persen di antara sembilan isu lainnya, seperti: kemiskinan; pengangguran; dan ketahanan pangan (Sumber: Databooks).

Meski demikian, ranah ekonomi tampak lebih positif melihat ledakan penduduk dalam satu konsep yang disebut “Bonus Demografi” (*Demographic Dividend*); tentunya dengan memenuhi sejumlah syarat. Mengacu pada definisi UNFPA, bonus demografi dipahami sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pergeseran struktur usia penduduk, di mana jumlah usia produktif jauh lebih besar dibanding usia non-produktif.

Melihat Peluang Indonesia

Indonesia sendiri digadang-gadang bakal menerima berkah bonus demografi dalam rentang 2020-2030; beberapa kalangan bahkan menganggap momentum itu sudah dimulai sejak tahun 2010. Menurut proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2016 telah didominasi oleh kelompok usia produktif antara 15-34 tahun. Berdasarkan proyeksi itu, bonus demografi Indonesia diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025-2030 (Sumber: Databooks).

Tapi, patut diingat bahwa bonus demografi bukanlah “hadiah cuma-cuma” yang bisa diterima dengan sikap *taken for granted*; ia hanya peluang yang bolehjadi hilang tanpa persiapan matang. Dibutuhkan langkah konsisten untuk

memenuhi syarat bonus demografi agar keadaan tersebut benar-benar menjadi berkah; bukan justeru menuai petaka.

Bonus demografi berpijak pada asumsi bahwa semakin rendah rasio ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif, menjadi peluang yang baik bagi pengembangan ekonomi suatu negara. Terminologi demografi sendiri membatasi usia produktif sebagai usia angkatan kerja dengan skala usia 15-64 tahun; karenanya usia tidak produktif dapat diartikan akumulasi dari usia 0-14 tahun dan usia di atas 65 tahun.

Tidak diperoleh informasi tentang tolak ukur yang digunakan untuk mengklasifikasikan skala di atas sebagai usia produktif dan usia tidak produktif. Asumsi yang lazim dijelaskan adalah, usia 0-14 tahun merupakan usia penduduk belum bekerja; sebaliknya, usia di atas 65 tahun dianggap tidak produktif lagi untuk bekerja.

Melihat beberapa fakta di lapangan, asumsi di atas bolehjadi tidak begitu tepat. Menurut data Komnas Perlindungan Anak (KPA) misalnya, terdapat 6,5 juta pekerja anak di Indonesia pada tahun 2009; 2,1 juta di antaranya bekerja di lingkungan terburuk. Angka itu jelas mengacaukan asumsi demografi mengenai angkatan kerja, sebab rasio pekerja anak sudah mencapai 5,71 persen dari total usia angkatan kerja pada tahun 2009 yang mencapai 113,83 juta jiwa (Sumber: PUSKAPOL FISIP UI).

Belum lagi diperhitungkan jumlah pekerja lanjut usia (lansia). Berdasarkan data statistik tahun 2014, jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa atau 8,03 persen dari total penduduk pada tahun itu. Hampir separuh dari penduduk lansia Indonesia masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, rasionya mencapai 47,48 persen. Ironisnya, hanya 3,35 persen di antara mereka yang mengecap pekerjaan “kerah putih,” sebagian besar merupakan pekerja “kerah biru” dengan rasio 74,10 persen; dan sebagian yang lainnya merupakan pekerja “kerah abu-abu” dengan rasio 23,61 persen (Sumber: BPS).

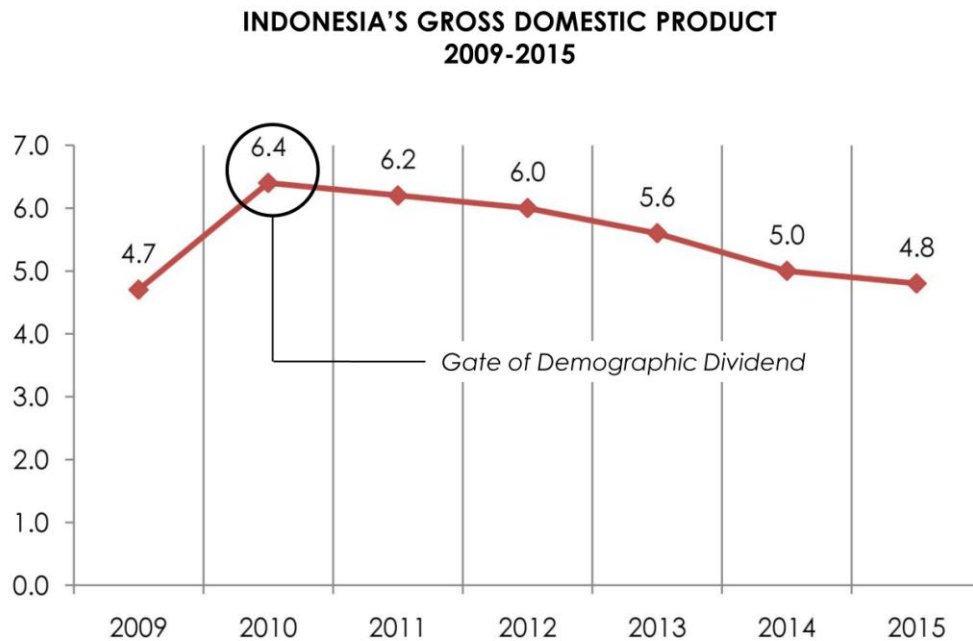
Keadaan di atas membuat “rasio ketergantungan” (*dependency ratio*) dalam asumsi demografi menjadi semakin bias, sebab tidak lagi jelas konsep “siapa bergantung kepada siapa.” Biasanya asumsi tersebut pada gilirannya menjadi “ancaman” bagi peluang pemanfaatan bonus demografi Indonesia yang diprediksi menemukan titik puncak kurang dari satu dekade ke depan.

Mengingat bonus demografi berpijak pada rasio ketergantungan, angka pengangguran dan kesempatan kerja menjadi lazim diperhitungkan untuk mencapainya. Usia angkatan kerja sendiri diperkirakan sebesar 125,44 juta jiwa berdasarkan catatan BPS bulan Agustus tahun 2016. Angka itu terdiri dari 118,41 juta jiwa penduduk bekerja, dan 7,03 juta jiwa pengangguran (Sumber: BPS).

Berdasarkan angka tersebut, tingkat kesempatan kerja boleh dianggap cukup tinggi; mencapai 94,40 persen yang berarti 94 orang dari 100 angkatan kerja dapat diserap dengan ketersediaan lapangan kerja. Meski demikian, ada asumsi bahwa angka ideal pengangguran semestinya berada pada level 3 persen; sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,61 persen, yang berarti setiap 100 angkatan kerja di Indonesia, terdapat 5-6 orang pengangguran.

Data-data di atas pada gilirannya melahirkan “kegamangan” tersendiri untuk mengukur besarnya manfaat bonus demografi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika bonus demografi diharapkan mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi, faktanya justeru tidak berbanding lurus dengan harapan itu. Indikator

yang paling lazim digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB); sejak 2010—tahun yang dianggap sebagai “gerbang” bonus demografi Indonesia itu—nyatanya menunjukkan tren menurun hingga periode tertentu.



Diolah dari: BAPPENAS, 2016

Merujuk kajian BAPPENAS berjudul: *Perekonomian Indonesia Tahun 2016: Prospek dan Kebijakan*, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB pada tahun 2010 diketahui tumbuh sebesar 6,4 persen. Sebagai tahun yang dianggap “gerbang” bonus demografi oleh beberapa pihak, pertumbuhan tersebut cukup menggembirakan mengingat pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya hanya berada pada angka 4,7 persen. Keadaan tersebut bolehjadi telah diamini sebagai “pembuktian” manfaat bonus demografi bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, pembuktian itu segera pupus melihat pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya. Sejak 2010 hingga 2015, perekonomian Indonesia secara perlahan mengalami penurunan hingga ke titik 4,8 persen. Betapapun keadaannya mulai membaik pada tahun 2016 dengan pertumbuhan 5,02 persen; angka itu tidak secara otomatis mampu menepis keraguan terhadap peluang bonus demografi mengingat pertumbuhan ekonomi dalam rentang lima tahun sebelumnya.

Upaya Optimalisasi

Sebagaimana disinggung pada deskripsi terdahulu, bonus demografi tidak lebih dari sebuah konsep yang hanya akan ideal jika memenuhi sejumlah syarat. Pada kenyataannya tidak semua pihak memandang optimis manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi pada gilirannya berlaku sebagai “pisau bermata dua,” menguntungkan jika syaratnya terpenuhi; atau *malah* menjadi beban karena ketidaksiapan menghadapinya.

Biar bagaimanapun “petaka” itu sudah terlanjur datang, karenanya yang harus dilakukan adalah optimalisasi manfaat agar “petaka” itu bisa dirubah menjadi “berkah.” Merujuk *policy memo* untuk mengambil manfaat bonus demografi Indonesia yang diterbitkan UNFPA, paling tidak ada tiga aspek yang patut dipertimbangkan, yaitu: ketersediaan lapangan kerja; tabungan; dan sumber daya manusia (Sumber: UNFPA).

Kalau melihat angka kesempatan kerja yang telah mencapai 94,40 persen sebagaimana pernah disinggung sebelumnya, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi bagi pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan kondisi itu, tingkat pengangguran sejak 2011-2016 juga memperlihatkan tren menurun dari angka 7,48 persen menjadi 5,61 persen rasionya terhadap jumlah angkatan kerja (Sumber: Databooks).

Betapun demikian, penting diingat bahwa Indonesia menempati posisi ketiga tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara (Sumber: Databooks); kondisi tersebut harus dijadikan sebagai “*warning*” untuk melahirkan berbagai kebijakan yang mampu menyerap tenaga kerja baru. Selain itu, bonus demografi juga menghendaki partisipasi angkatan kerja perempuan yang sejatinya masih sangat rendah di Indonesia jika dibandingkan dengan partisipasi angkatan kerja laki-laki (Sumber: BPS).

Dalam hal persaingan tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia pada gilirannya menjadi penting dipertimbangkan. Jika melihat statistik pendidikan penduduk Indonesia usia kerja pada tahun 2015, kondisinya cukup ironis; 25,98 persen dari 186,1 juta penduduk usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan SD; 21,97 persen berpendidikan SLTP; dan 12,49 persen tidak tamat SD (Sumber: Databooks). Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang relatif rendah.

Kualitas sumber daya manusia—termasuk pendidikan—tentunya akan mempengaruhi daya saing di pasar kerja. Kondisi inilah yang semestinya disadari untuk mempersiapkan tenaga kerja yang benar-benar memiliki daya saing. Pada kenyataannya, menjadi semacam hal yang “dimaklumi” bahwa persaingan tenaga kerja di Indonesia justeru bertolak pada isu “pribumi vs non pribumi,” mental tersebut pada gilirannya mengabaikan kualitas sebagai syarat mutlak yang dituntut dunia kerja.

Berbicara mengenai lapangan kerja juga semestinya tidak bersifat pasif, tapi menghendaki partisipasi masyarakat untuk aktif mendorong terbukanya lapangan kerja melalui ekonomi kreatif. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong tumbuhnya iklim ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Penutup

Berdasarkan uraian singkat di atas, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa bonus demografi hanya satu “rumus” untuk menjadikan ledakan penduduk bermanfaat bagi perekonomian. Jika penggunaan rumus itu tepat, manfaatnya akan diperoleh sehingga keadaan demografi bisa dianggap “bonus” karena mampu menuai berkah. Sebaliknya, jika penggunaan rumus itu keliru, keadaannya justeru menjadi “petaka.”

Bonus demografi juga berarti ‘kerjasama yang baik.’ Betapapun pemerintah berupaya untuk optimal mendorong termanfaatkannya bonus demografi, tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dengan cara merubah watak dan mentalnya, bonus demografi akan jauh dari kata berhasil.